

ORASI ILMIAH GURU BESAR

**DEVOLUSI PENGELOLAAN HUTAN
DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT
PEDESAAN**

ORASI ILMIAH

**Guru Besar Tetap
Fakultas Kehutanan**

Prof. Dr. Ir. Didik Suharjito, M.S.

**AUDITORIUM REKTORAT
GEDUNG ANDI HAKIM NASOETION
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
03 Mei 2014**



Ucapan Selamat Datang

Yth. Rektor IPB

Yth. Ketua dan Anggota Senat Akademik IPB

Yth. Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar IPB

Yth. Para Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Departemen,
dan Pejabat Struktural di lingkungan IPB

Yth. Rekan-rekan para Dosen, Tenaga Kependidikan, mahasiswa,
dan alumni IPB

Keluarga, kerabat, dan handai tolan yang saya hormati dan saya
cintai

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan salam Indonesia

Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Swt.
atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat
menghadiri acara Orasi Ilmiah Guru Besar IPB dalam keadaan sehat
wal afiat.

Pada kesempatan ini perkenankan saya sebagai Guru Besar Tetap
Fakultas Kehutanan IPB dalam bidang ilmu Manajemen Hutan
menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul:

Devolusi Pengelolaan Hutan dan Pembangunan Masyarakat Pedesaan





Prof. Dr. Ir. Didik Suharjito, M.S.



Daftar Isi

Ucapan Selamat Datang	iii
Foto Orator	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Marginalisasi Masyarakat Pedesaan dalam Politik Pembangunan Kehutanan	1
Paradigma Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat	3
Devolusi Pengelolaan Hutan	7
Menguatkan Studi Kehutanan Sosial	16
Epilog	20
Daftar Pustaka	21
Ucapan Terima kasih	28
Foto Keluarga	35
Riwayat Hidup	37



Daftar Tabel

Tabel 1 Tahapan proses dan luas areal hutan program HKm, HD dan HTR sampai Februari 2014.....	10
--	----



Marginalisasi Masyarakat Pedesaan dalam Politik Pembangunan Kehutanan

Kawasan hutan di Indonesia terus mengalami degradasi dan deforestasi sejak eksploitasi hutan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar pemegang ijin hak pengusahaan hutan (HPH) mulai tahun 1970-an. Menjelang tahun 2000-an tingkat degradasi hutan mengalami eskalasi yang sangat tinggi, sehingga kondisi hutan selama lima belas tahun terakhir sangat memprihatinkan dan aktivitas pengusahaan hutan terus menyusut¹. Pada akhir Pelita I (tahun 1973/1974) terdapat 642 unit perusahaan kehutanan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dengan luas areal kerja 60,7 juta ha (Departemen Kehutanan RI 1986), pada tahun 1992 jumlah perusahaan yang beroperasi adalah 580 unit dengan luas areal konsesi 61,38 juta ha, sedangkan pada masa kini (2013) jumlah perusahaan yang beroperasi jauh menurun menjadi 294 unit dengan luas areal konsesi 23,9 juta ha. Luas hutan yang terlantar karena ditinggalkan perusahaan (tidak aktif) adalah 14,7 juta ha, hutan alam sekunder tidak dibebani hak dan terlantar adalah 33,6 juta ha (Widyantoro 2013).² Degradasi hutan berkaitan dengan okupasi dan konflik penguasaan hutan yang terjadi di berbagai kawasan. Akibat konflik penguasaan dan okupasi lahan hutan oleh pihak lain, perusahaan HPH tidak aktif. Kondisi tersebut telah mengundang perhatian, pengakuan, dan keprihatinan dari berbagai pihak. Dalam rangka hari pulang kampus Fakultas Kehutanan IPB

1 Purnama (Kepala Badan Planologi Kehutanan) menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan pada periode 1985–1997 tercatat 1,6 juta ha/tahun; pada periode 1997–2000 mencapai 3,8 juta ha/tahun. Aktivitas penebangan liar, penyelundupan kayu dan konversi kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain menjadi penyebab kerusakan hutan.

2 Lihat juga penjelasan Awang (2013a; 2013b); Gunarso (2013).

pada tahun 2012 meluncurkan buku berjudul “Kembali ke Jalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktik Kehutanan Indonesia” dan pada ulang tahun emas Fakultas Kehutanan IPB tahun 2013 kembali meluncurkan buku berjudul “Pembangunan Kehutanan Indonesia Baru”. Fakultas Kehutanan UGM pada ulang tahun emas 2013 meluncurkan buku berjudul “Darurat Hutan Indonesia: Mewujudkan Arsitektur Baru Kehutanan Indonesia”. Dalam buku-buku tersebut digambarkan berbagai permasalahan kehutanan dan tawaran solusinya.

Gejala degradasi hutan, okupasi dan konflik penguasaan kawasan hutan berkaitan dengan akumulasi permasalahan mendasar dalam politik pembangunan kehutanan selama ini, khususnya politik yang memarginalkan masyarakat desa hutan untuk dapat berperan dalam pembangunan kehutanan. Masyarakat desa hutan tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan, bahkan dipandang dan diposisikan sebagai pihak yang mengganggu dan yang merusak. Masyarakat desa hutan sering dituduh sebagai penyebab degradasi hutan dan deforestasi melalui aktivitas tebas dan bakar hutan sebagai bagian dari sistem pertanian ladang (Gillis 1988; Ascher 1995; Dove 1992; Dove 1996; Potter 1996). Sebagai akibatnya, masyarakat desa hutan bukan saja sangat terbatas memperoleh manfaat atas keberadaan sumber daya hutan di sekitarnya, mereka semakin sulit kehidupannya, bertambah miskin, dan terdorong untuk terlibat dalam aktivitas pemanfaatan hutan yang tidak memerhatikan prinsip-prinsip kelestarian hutan. Intervensi politik kebijakan pembangunan dan ekonomi pasar yang sangat kuat telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat desa hutan, antara lain pengetahuan lokal dan institusi lokal yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam, sehingga tidak mampu mencegah degradasi hutan dan deforestasi (Dove 1996;

Gibson *et al.* 2000; Nanang and Inoue 2000; Suharjito 2010; Dove 2011). Sementara itu, masyarakat pendatang (yang kemudian menetap) yang menjalankan aktivitas konversi hutan menjadi kebun-kebun komersial atau pembalakan liar (*illegal logging*) (Gillis 1988; Potter 1996; Vayda 1996; Vayda 2009) juga mendorong masyarakat setempat untuk melakukan hal yang sama.

Perspektif *social ecology* memandang persoalan kerusakan hutan merupakan akibat dari dominasi manusia atas alam (*the domination of nature by humans*), tetapi akarnya ada pada dominasi manusia atas manusia (*the domination of humans by humans*). Oleh karena itu, perspektif *social ecology* menawarkan *strategic priority thesis*, yakni mendahulukan pembebasan manusia dari penindasan oleh manusia lain (Rowlands 2000). Konsep pembangunan partisipatif menawarkan upaya pengakuan dan penghormatan atas kesetaraan sosial, pengetahuan dan hak-hak masyarakat lokal, dan keadilan sosial. Dengan kata lain, problem krisis lingkungan hidup dan kemiskinan dapat dipecahkan melalui perwujudan status dan peran masyarakat lokal dalam pembangunan, termasuk pembangunan kehutanan (Suharjito 2008).

Paradigma Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Pembangunan kehutanan di Indonesia pada akhir-akhir ini dan yang akan datang dituntut oleh berbagai *stakeholders* harus berlandaskan pada paradigma baru. Bukan lagi pada *state based forest management* atau pengelolaan hutan yang dikontrol secara memusat oleh pemerintah, melainkan *community based forest management* (CBFM); bukan *timber extraction* ataupun *timber management*,

melainkan *ecosystem based-forest management* (EBFM).³ CBFM menekankan pada subjek atau pelakunya, yaitu masyarakat desa hutan, sedangkan EBFM menekankan pada objek dan wilayahnya (lanskap sebagai suatu ekosistem).

Paradigma CBFM memandang bahwa (1) ekosistem-ekosistem alam pada dasarnya kompleks, beranekaragam, variasi lokal, melampaui pemahaman kita dan sangat sulit untuk memprediksinya; (2) perubahan-perubahan sosial-ekologis secara sinergis di dunia sedang terjadi lebih cepat dan lebih ketat dengan umpan balik yang cepat sehingga sulit untuk mengantisipasinya; (3) pembangunan harus berpusat pada manusia. Masyarakat desa hutan sebagai pemeran utama dalam pengelolaan hutan bukan saja karena masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan, kelembagaan lokal, dan tanggung jawab; tetapi juga memiliki kemampuan adaptasi dan inovasi; (4) masyarakat desa hutan memiliki norma dan nilai yang mendasari pengelolaan hutan yang memerhatikan prinsip-prinsip ekologi, ekonomi, dan sosial budaya; (5) tenaga ahli (yang memiliki ilmu pengetahuan: pemerintah, penyuluh, peneliti) berperan sangat penting sebagai pendamping untuk meningkatkan kapasitas dan menguatkan kemandirian masyarakat desa; serta menguatkan mekanisme-mekanisme manajemen konflik yang efektif dan adil; (6) tujuan utama pembangunan adalah pertumbuhan, keadilan, dan kesejahteraan melalui proses-proses partisipasi masyarakat sepenuhnya, adaptasi, pemecahan masalah, dan kesempatan secara terus menerus; pembangunan tidak berkembang dan bergerak ke satu arah yang tunggal (Korten 1984; Korten 1987; Ohlsson dan Byron 1989; Chambers 1993; van Gelder and O'Keefe 1995).

³ Lihat Suhendang (2013) untuk pembahasan lebih lanjut tentang perkembangan paradigma kehutanan.

Hubungan dinamis antara manusia/masyarakat dan hutan terjadi dua arah. Interaksi antara keduanya positif apabila hutan menopang kualitas kehidupan masyarakat yang tinggi, dan sebaliknya masyarakat berperan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hutan. Jika kebutuhan manusia meningkat maka kualitas hutan juga harus meningkat. Jika interaksinya negatif, masyarakat memanfaatkan hutan tanpa menjaganya, sehingga yang terjadi adalah perusakan hutan, demikian pula jika masyarakat diminta untuk menjaga hutan tetapi tidak memperoleh manfaat dari hutan maka yang terjadi adalah pemiskinan kualitas kehidupan masyarakat. Jika masyarakat miskin maka hutan akan dirusaknya.

Pemahaman tentang interaksi dinamis antara masyarakat dan hutan sangat penting bagi kita, bagi para pelaku pembangunan kehutanan. Pemerintah lebih sering memperlakukan masyarakat desa hutan hanya sebagai objek, bukan subjek. Pemerintah lebih sering mengatur kehidupan masyarakat desa hutan, melarang masyarakat untuk memanfaatkan hutan, memperlakukan masyarakat sebagai pelaksana program-program yang digelar oleh pemerintah. Demikian pula perusahaan kehutanan memperlakukan masyarakat desa hutan sebagai pelaksana program-programnya. Program-program tersebut seolah-olah untuk masyarakat, seolah-olah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, padahal tidak selalu demikian. Masyarakat seolah-olah hanya memiliki tenaga, mereka dianggap tidak memiliki pengetahuan, keahlian, keinginan, harapan, kreativitas, inovasi, dan adaptasi. Padahal kehutanan justru lebih merupakan proses sosial, kelestarian hutan adalah suatu proses sosial adaptif. Meminjam pernyataan Romm (1993).

“Forestry is the regime of action by which people conserve, augment, modify, and replace features of the forest so as to perpetuate its desired qualities, whatever these may be. It is a social process rather than a forest condition” (Romm 1993).

Perubahan pandangan secara berangsur sedang terjadi. Pada awal tahun 1980-an, pendekatan baru dalam pengelolaan hutan, yakni partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mulai dilakukan di beberapa negara tropis. Minat ini muncul sebagai respons terhadap perhatian yang meningkat dalam bidang kehutanan, konservasi alam, dan pembangunan kelompok-kelompok masyarakat kecil di pedalaman (Poffenberger 1990; Arnold 1991; Redford and Padoch 1992). Pergeseran tersebut terjadi sebagai respons terhadap kritik-kritik yang diterima. Ilmu kehutanan sosial dengan paradigma CBFM telah berkontribusi dalam menggeser pandangan tersebut.

Di Indonesia, program *prosperity approach* digelar oleh Perum Perhutani di Jawa mulai tahun 1972, sebelum Kongres Kehutanan Dunia (KKD) ke VIII di Jakarta dengan tema *forest for people* pada tahun 1978. Setelah KKD ke VIII, Perum Perhutani juga menggelar program PMDH (Pembinaan Masyarakat Desa Hutan pada tahun 1984, program MA-LU (Mantri-Lurah), program *social forestry* (Perhutanan Sosial) pada tahun 1986, dan Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat (PHBM) sejak tahun 2000. Sementara itu, untuk daerah di luar Jawa para perusahaan HPH menyelenggarakan program Bina Desa Hutan (selanjutnya disebut program PMDH) mulai awal tahun 1990-an, CD (*Community Development*), MHBM (Membangun Hutan Bersama Masyarakat), dan Hutan Tanaman Pola Kemitraan. Namun demikian, pandangan bahwa masyarakat pedesaan dapat berperan positif belum menjadi arus utama dan dianut oleh para pengambil kebijakan pembangunan kehutanan.

Devolusi Pengelolaan Hutan

FAO (2011) melaporkan bahwa akhir-akhir ini dorongan untuk melakukan reformasi penguasaan hutan (*forest tenure*) terus meningkat di berbagai negara. Demikian pula Bull dan White (2002) menjelaskan bahwa kehutanan di dunia sedang mengalami transisi, salah satunya terjadi dalam hal luas hutan yang dimiliki atau dikelola oleh masyarakat bertambah menjadi dua kali lipat dibandingkan satu dekade yang lalu. Di beberapa negara pemerintah telah membuka akses dan memberi hak atas hutan kepada masyarakat. Setiap negara mempunyai alasan-alasannya sendiri, meskipun ada alasan-alasan yang sama, mengapa melakukan perluasan akses dan hak masyarakat atas hutan. Beberapa alasan yang penting (FAO 2011) adalah (1) *regime* penguasaan hutan yang dominan saat ini belum berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan utama pengelolaan hutan seperti pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*, SFM), pengentasan kemiskinan, perbaikan mata pencaharian atau hak-hak masyarakat lokal; (2) peninjauan kebijakan nasional yang menyeluruh dalam menghadapi globalisasi khususnya tekanan pasar dan penyebaran asosiasi sektor swasta yang meningkat; (3) tekanan yang meningkat pada hutan akibat pertumbuhan penduduk dan peningkatan permintaan hasil-hasil hutan (dan juga lahan hutan untuk penggunaan non-hutan); (4) kekuasaan dan pengaruh para pihak (*stakeholders*) yang meningkat seperti masyarakat lokal dan kelompok-kelompok yang termarjinalkan untuk menuntut hak dan mengklaim sumber daya hutan.

Devolusi pengelolaan hutan didefinisikan sebagai pelimpahan kekuasaan (*power*) dari pemerintah pusat kepada masyarakat desa hutan. Devolusi memberikan seperangkat hak (*rights*) dan

tanggung jawab (*responsibilities*), dan kekuasaan kepada masyarakat desa hutan untuk merencanakan tujuan, mengambil keputusan secara independen, bukan hanya melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang sudah dirancang oleh pemerintah pusat (lihat Fisher 1999; Fisher 2000; Edmunds *et al.* 2003). Devolusi pengelolaan hutan bukan sebagaimana “*social forestry*” dalam arti program-program subsidi pemerintah untuk pengguna hutan yang didesain dan diimplementasikan oleh pemerintah sebagai bagian dari program kesejahteraan sosial bagi kelompok masyarakat yang miskin atau lemah (Ascher 1995), seperti tumpang sari, PMDH, GERHAN, Bantuan Bibit Desa.

Di Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada, sebagian besar hutan-hutan tanaman dikelola oleh rumah tangga. Demikian juga di China, Vietnam, Korea Selatan. Pemerintah China, Vietnam, dan Korea Selatan memberikan kepercayaan terhadap masyarakat lokal untuk mengelola hutan. Di Kanada dengan *model forest*, British Columbia dengan *community forestry*, Colorado dengan *Ponderosa Pine Forest Partnership*, serta China dengan *household-based forest management*, *collective-based forest management*, dan *shareholding systems*. Malaysia, Filipina, Papua New Guinea, Australia, India, New Zealand telah mempunyai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menghapuskan marjinalisasi penduduk asli. Pemerintah India sejak tahun 1990 mengimplementasikan *Joint Forest Management* (JFM) di seluruh negara Bagian (Suharjito 2009). Pemerintah Filipina melaksanakan program CBFM (*Community Based Forest Management*) sejak tahun 1995. Masyarakat memperoleh akses (atas) dan manfaat (dari) sumber daya hutan melalui pemberian hak penguasaan atas lahan hutan kepada masyarakat selama 25 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun. Masyarakat wajib melakukan

rehabilitasi, proteksi, dan konservasi. Dari 0 ha areal untuk CBFM pada tahun 1980-an dan kurang dari 1,0 juta hektar pada tahun 1995, menjadi lebih dari 5,97 juta hektar tersebar di 5.503 lokasi dengan 690.691 rumah tangga dan 2.877 organisasi rakyat (*people's organisations*) pada tahun 2005an (Pulhin *et al.* 2007 *dalam* Suharjito 2009; Pulhin dan Inoue 2008 *dalam* Suharjito 2009). Demikian juga pemerintah Bolivia telah memberikan hak pemilikan secara legal atas hutan seluas 12 juta hektar kepada masyarakat asli; pemerintah Brazil memberikan hak milik atas lahan seluas 103 juta hektar; pemerintah Colombia memberikan hal yang sama seluas 27 juta hektar, Ecuador memberikan lahan seluas 4.5 juta hektar, dan pemerintah Guyana memberikan 1.4 juta hektar termasuk hutan (ITTO 2006 *dalam* FAO 2009). Kasus-kasus di Nepal, Filipina, India, Vietnam telah membuktikan bahwa devolusi pengelolaan hutan memperbaiki kondisi biofisik hutan yang sebelumnya terdegradasi (Yadap *et al.* 2003; Pulhin *et al.* 2007; Edmunds and Wollenberg 2003).

Pemerintah Indonesia kini sedang mengembangkan program Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), secara keseluruhan sebagai program Kehutanan Masyarakat (KM). Dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011–2030 disebutkan bahwa target luas kawasan hutan yang dialokasikan untuk usaha hutan skala kecil (HKm, HD, dan HTR) adalah 5,6 juta ha. Realisasinya sampai Februari 2014 masih rendah (Tabel 1), karena masalah-masalah di lapangan (misalnya tumpang tindih areal atau konflik) maupun lamban dalam penetapan keputusan di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat⁴.

⁴ Beberapa hambatan-hambatan terhadap program HKm dan HD telah dijelaskan oleh Himawan (2013) dan Santoso (2013).

Alokasi kawasan hutan untuk KM dalam RKTN tersebut relatif sangat kecil (11,3%) dibandingkan dengan alokasi kawasan hutan untuk usaha kehutanan skala besar (43,6 juta ha atau 88,7%). Program-program HKm, HTR, dan HD harus terus diupayakan perwujudannya dalam kerangka devolusi pengelolaan hutan sebagai tindakan nyata dari spirit sosialisme Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUPA No. 5/1960. Devolusi pengelolaan hutan sebagai jalan untuk reforma agraria di bidang kehutanan. Berapa luas kawasan hutan yang dialokasikan untuk KM?

Tabel 1 Tahapan proses dan capaian luas areal hutan program HKm dan HD (sampai Februari 2014), serta HTR (sampai November 2013)

No	Tahapan Proses	HKm (ha)	HD (ha)	HTR (ha)	Keterangan
1.	Usulan Daerah (Bupati)	615.798	759.607		
2.	Verifikasi areal usulan	496.303	495.611		
3.	Pencadangan areal			700.162	119 SK
4.	Penetapan Areal Kerja oleh Menhut	311.487	202.980		HKm: 17 Provinsi, 43 Kab/Kota dan 57 unit SK. HD: 92 desa, 23 Kabupaten, 14 Provinsi
5.	Ijin Usaha Pemanfaatan	80.833			236 unit SK, 229 KTH, 26.400 KK

Tabel 1 Tahapan proses dan luas areal hutan program HKm, HD dan HTR sampai Februari 2014 (lanjutan)

No	Tahapan Proses	HKm (ha)	HD (ha)	HTR (ha)	Keterangan
6.	Hak Pengelolaan		51.492		26 Desa, 9 Kabupaten, 6 provinsi
7.	Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	531		183.832	Jumlah pemegang izin HTR 6.258

Sumber: Catatan Gladi Hardiyanto, Diolah dari Data Direktorat Bina Perhutanan Sosial dan Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman

Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) tahun 2006 dan 2008, jumlah desa hutan yang tersebar di 32 provinsi sebanyak 19.410 desa atau 26,7%.⁵ Jumlah penduduk desa hutan mencapai lebih dari 37 juta jiwa atau 17,1% dari penduduk Indonesia.⁶ Provinsi yang memiliki jumlah desa hutan paling banyak adalah Provinsi Papua, yaitu 1.974 desa (59,6%) atau 10,2% dari seluruh desa hutan di 32 provinsi, sedangkan provinsi yang memiliki jumlah desa hutan paling sedikit adalah Provinsi DI. Yogyakarta, yaitu 58 desa di tepi hutan (13,2%). Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang memiliki proporsi desa hutan paling tinggi, yaitu 65,5%, disusul

5 Desa-desa di dalam dan di sekitar atau di tepi hutan dalam tulisan ini disingkat “desa hutan”, menggambarkan letaknya (dimensi ruang) atau tingkat ketergantungan kehidupan masyarakatnya terhadap sumber daya hutan. Masyarakat desa hutan disebut juga sebagai masyarakat lokal.

6 Lihat publikasi Badan Planologi Kehutanan. 2007. Identifikasi Desa Dalam Kawasan Hutan 2007. Kerja sama Departemen Kehutanan dan Badan Pusat Statistik. Jakarta dan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. 2009. Identifikasi Desa di Dalam dan di Sekitar Kawasan Hutan 2009. Jakarta. Konsep kawasan hutan yang digunakan dalam laporan ini menunjuk pada kawasan hutan negara, tidak termasuk hutan-hutan pada tanah milik.

Kalimantan Timur (56,62%), dan Kepulauan Bangka Belitung (44,86%), Kalimantan Barat (42%), Maluku (41,9%), dan Sulawesi Tenggara (41,1%). Sementara Banten merupakan provinsi yang memiliki proporsi desa hutan paling rendah, yaitu 10,8%.

Luas wilayah administratif desa hutan di 32 provinsi adalah 88,9 juta ha, 22,5 juta ha di antaranya berada di dalam kawasan hutan negara.⁷ Provinsi yang memiliki wilayah desa hutan terluas adalah Papua, yaitu 15,3 juta ha (17,2%), 7,9 juta ha di antaranya berada di dalam kawasan hutan negara. Provinsi Kalimantan Timur menduduki posisi kedua dengan luas wilayah desa hutan 11,6 juta ha (13,1%), 3,9 juta ha di antaranya berada di dalam kawasan hutan negara; diikuti oleh Kalimantan Tengah (8,5 juta ha) dan Kalimantan Barat (7,4 juta ha). Apabila disandingkan dengan data luas kawasan hutan negara, maka luas wilayah administratif desa yang berada di dalam kawasan hutan mencapai 17,2%; di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 27,3%, di Papua 26,2%, dan di Kalimantan Tengah 19,6%.

Berdasarkan jumlah dan penyebaran desa hutan, luas wilayahnya yang mencakup kawasan hutan, dan jumlah penduduknya tersebut, maka suatu yang ironis apabila peran masyarakat desa hutan dalam pengelolaan hutan diabaikan. Apalagi pengelolaan hutan negara oleh perusahaan-perusahaan besar selama ini belum membawa kemakmuran bagi masyarakat desa hutan. Jumlah penduduk miskin yang bertempat tinggal di desa hutan sekitar 12 juta jiwa atau 32,4% dari penduduk pedesaan sekitar hutan, atau 66,3%

⁷ Luas wilayah administratif desa yang menjadi bagian dari kawasan hutan negara, atau sebaliknya luas kawasan hutan negara yang menjadi bagian wilayah administratif desa akan lebih luas dari 22,5 juta ha, karena sebagian dari wilayah administratif desa di tepi hutan berada di dalam kawasan hutan negara sebagaimana didefinisikan dalam dokumen PODES 2006 dan PODES 2008.

dari penduduk pedesaan yang tergolong miskin.⁸ Masyarakat desa hutan sangat potensial untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, dan sebaliknya kawasan hutan yang menjadi bagian dari wilayah administratif desa hutan (lebih dari 22,5 juta ha) sangat potensial untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat desa hutan. Darusman (2012) memberikan argumentasi mengapa partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan penting, yaitu (1) fakta yang sangat otentik bahwa jumlah mereka banyak, memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menjadi pendukung, atau sebaliknya menjadi perusak; (2) mereka adalah bagian atau unsur dari ekosistem hutan yang saling tergantung; (3) mereka adalah warga bangsa yang ingin sejahtera, berhak untuk mendapatkan keadilan, berhak untuk berperan dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah mereka bertempat tinggal.

Devolusi pengelolaan hutan memberikan kepastian hak-hak masyarakat desa atas hutan. Kepastian itu menunjuk pada hak-hak seseorang atas lahan diakui oleh orang lain dan dilindungi oleh hukum formal maupun hukum adat (Herrera dan da Passano 2006), sesuai dengan kondisi *de facto*, serta dirasakan atau dipersepsikan oleh pemegang hak (van Gelder 2010). Situasi kekinian persoalan kawasan hutan, devolusi pengelolaan hutan menjadi jalan bagi (1) pengakuan terhadap hutan adat-hutan adat yang telah ada pada kelompok-kelompok masyarakat apakah ia berada di luar kawasan hutan negara maupun di dalam kawasan hutan negara, dan (2) pemberian hak pengelolaan hutan negara kepada masyarakat

8 Jumlah penduduk Indonesia yang tergolong miskin pada tahun 2012 masih mencapai 28,6 juta jiwa atau 11,7%, 18,1 juta jiwa atau 63,3% di antaranya bertempat tinggal di pedesaan. Meskipun proporsinya sudah jauh lebih rendah dari pada awal Orde Baru, tetapi jumlah absolutnya masih sangat tinggi. Studi tentang kemiskinan masyarakat desa hutan dan kaitannya dengan keberadaan hutan antara lain Rositah (2005); Tacconi and Kurniawan (2006), dan Sunderlin et al. (2007).

desa hutan. Pengakuan terhadap hutan adat telah didukung oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012. Dalam keputusan MK tersebut dinyatakan bahwa pasal 1 (6) pada UUNo. 41/1999 yang menyatakan “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” (garis bawah dari saya), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang benar adalah “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Keputusan itu perlu tindak lanjut segera, tetapi dengan hati-hati terhadap berbagai peluang konflik antar-kelompok masyarakat.

Devolusi diharapkan lebih memberikan keadilan (*equity*) dalam distribusi penguasaan hutan kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat menghasilkan kehidupan masyarakat yang lebih harmonis dan lebih makmur. Namun demikian, dalam proses devolusi pengelolaan hutan harus diperhatikan distribusi penguasaan lahan hutan. Jangan sampai proses devolusi justru meningkatkan ketimpangan distribusi penguasaan lahan di antara warga masyarakat desa hutan, sehingga kelompok-kelompok keluarga miskin terpinggirkan dan tujuan dari devolusi tidak tercapai. Pengalaman-pengalaman di Vietnam, Filipina, China, India, dan lainnya menjadi pelajaran penting (Tran dan Sikor 2006; Nguyen 2006; Pulhin *et al.* 2007).

Devolusi pengelolaan hutan perlu dibarengi dengan pengembangan kapasitas masyarakat desa hutan sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya hutan dan pihak-pihak lain (pemerintah pusat dan daerah, LSM, akademisi, lembaga penelitian) sebagai pendamping atau fasilitator. Kapasitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, baik untuk kepentingan dirinya maupun kepentingan pihak lain. Kemampuan itu merupakan perpaduan dari

pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), pengalaman (*experiences*), daya cipta (*inovativeness*), dan hasrat/cita-cita (*desire*) (Suharjito 2009; Suharjito 2013). Berbagai praktik pengelolaan hutan oleh masyarakat desa hutan di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat desa hutan mempunyai kapasitas untuk mengelola hutan secara lestari (Suharjito *et al.* 2000). Hutan Rakyat di Jawa (Wonogiri, Gunung Kidul, Kebumen, Lumajang, dan lainnya) dan Konawe Selatan sudah lulus sertifikasi ekolabel (dengan skema sertifikasi Lembaga Ekolabel Indonesia ataupun *Forest Stewardship Council* (FSC), menunjukkan bukti bahwa hutan rakyat dikelola secara lestari. Pengetahuan dan pengalaman masyarakat tersebut dapat menjadi landasan dalam pengembangan kapasitas masyarakat desa hutan dalam pengelolaan hutan lestari dalam situasi sosial, ekonomi, dan politik yang dinamis (Suharjito 2013).

Peran pemerintah sebagai pendukung, fasilitator sangat penting bagi pengelolaan hutan oleh masyarakat desa, dari pada melakukan tindakan-tindakan dominasi (Korten 1984; Korten 1987; Chambers 1993; Ascher 1995). Pemerintah (Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, para penyuluh kehutanan lapangan, dan dinas-dinas lainnya) harus siap untuk melayani dan memfasilitasi masyarakat. Orientasi tanggung jawabnya kepada masyarakat desa hutan menjadi bagian dari *good governance*. Pemerintah harus dapat menunjukkan tata kelola sumber daya hutan secara adil, transparan, efisien, dan responsif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi warga negara. Peningkatan kapasitas pemerintah diperlukan agar proses devolusi pengelolaan hutan dapat berjalan pada seluruh level dari pusat sampai lokal, serta didukung oleh sektor lainnya dan para pihak secara berkesinambungan (Suharjito 2013).

Pembangunan masyarakat pedesaan tidak cukup hanya melalui distribusi lahan hutan dan usaha produksi hutan, melainkan harus juga dibarengi dengan usaha pengolahan hasil hutan atau industri kehutanan skala kecil, skala rumah tangga, yang beroperasi di pedesaan. Pengelolaan hutan oleh rakyat (HKm, HD, dan HTR, dan hutan rakyat pada lahan milik) sangat perlu diintegrasikan dengan pengembangan industri pedesaan berbahan baku hasil hutan. Integrasi program tersebut sangat penting bagi pembangunan ekonomi pedesaan. Pengembangan industri berbahan baku hasil hutan di pedesaan akan meningkatkan produktivitas sumber daya ekonomi (hutan dan tenaga kerja), meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan menguatkan hubungan sosial sesama warga pedesaan. Implikasinya adalah peningkatan pendapatan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, peningkatan peredaran uang di pedesaan, dan pengurangan urbanisasi tenaga kerja, serta pemeliharaan keberlanjutan hutan (Suharjito 2012). Dengan demikian, devolusi pengelolaan hutan dapat menjadi bagian integral yang penting dari pembangunan masyarakat pedesaan hutan. Tantangan bagi ahli teknologi hasil hutan adalah meningkatkan perannya dalam pengembangan teknologi tepat guna untuk industri berbahan baku hasil hutan di pedesaan, bukan hanya berperan dalam pengembangan teknologi untuk industri skala besar.

Menguatkan Studi Kehutanan Sosial

Disiplin kehutanan sosial dikembangkan sebagai subdisiplin dari ilmu kehutanan, sebagai landasan teori dan metodologinya meminjam disiplin (subdisiplin) yang lebih dahulu berkembang, yaitu sosiologi

sumber daya alam (*sociology of natural resources*), antropologi ekologi (*ecological anthropology*), sosiologi lingkungan (*environmental sociology*), antropologi lingkungan (*environmental anthropology*), ekologi manusia (*human ecology*), sosiologi pedesaan (*rural sociology*), politik ekologi (*political ecology*). Mereka memberikan perhatian terhadap kelompok masyarakat yang tergantung pada sumber daya alam, memberikan kerangka pengetahuan tentang hubungan timbal-balik manusia dan lingkungan (Field and Burch 1988; Lee *et al.* 1990; Dunlap and Michelson 2002; Kusel and Adler 2003; Field *et al.* 2005). Disiplin (sub disiplin) kehutanan sosial berusaha untuk memahami interaksi antara masyarakat dan hutan, memberikan penjelasan dan jawaban bagaimana keberadaan hutan bagi kualitas kehidupan masyarakat lokal; dan sebaliknya bagaimana kelompok masyarakat desa hutan mengelola hutan untuk mewujudkan fungsi-fungsi hutan secara lestari. Dua sisi ini tidak dapat dipisahkan, saling mendukung satu sama lain sebagai satu kesatuan.

Kata “sosial” dalam kehutanan sosial menunjuk pada konteks dari keberadaan dan fungsi hutan, merupakan komponen dari satu kesatuan sistem (ekosistem) hutan dan masyarakat lokal. Perhatian kehutanan sosial tidak terbatas pada interaksi antara individu-individu dengan hutan, melainkan mencakup interaksi masyarakat sebagai kolektivitas sosial dengan hutan, interaksi yang terjadi di dalam sistem sosial masyarakat lokal, dan interaksi antar-komponen biosfisik hutan. Di dalam sistem sosial mencakup subsistem budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Sistem sosial tidak tertutup, sehingga konteks sosial yang diperhatikan dalam studi kehutanan sosial dapat mencakup sistem sosial satu satuan ekosistem daerah aliran sungai (DAS), regional, nasional, dan global. Namun demikian, sistem sosial masyarakat lokal menjadi inti perhatiannya.

Terdapat empat landasan untuk mengembangkan ilmu kehutanan sosial. Pertama, keberadaan praktik-praktik *community forestry* (Kehutanan Masyarakat, KM) tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan negara-negara lain, baik di barat maupun timur, utara maupun selatan. Apa yang ada di dalam KM adalah wujud fisik hutan-hutan, tetapi yang lebih utama adalah adanya peran manusia-manusia dalam suatu satuan masyarakat (komunitas) yang berinteraksi dengan hutan-hutan yang ada. Apa yang menjadi "fakta" atau apa yang dianggap "ada" dalam mengkaji KM merupakan ontologis (*what being*).

Kedua, keberadaan praktik KM merupakan sumber pengetahuan, sebagai landasan epistemologis. KM merupakan objek penelitian karena keberadaannya dapat diamati; ada fakta-fakta atau gejala-gejala empiris yang dapat diamati dan diukur. KM menjadi objek kajian terutama bagi ilmu-ilmu yang mendasarkan pada model aposteriori. Kajian yang sistematis mulai dari fakta-fakta konkret sampai proses refleksi dan abstraksi akan menghasilkan ilmu pengetahuan KM. Karena KM bukan hanya mengaktualisasikan objek fisik hutan, melainkan juga manusia-manusia dalam suatu satuan masyarakat (komunitas), maka KM bukan hanya sebagai objek kajian, melainkan di dalamnya terdapat pula subjek-subjek pengkaji, yakni para pelaku pengelola hutan yang belajar terus menerus dari pengalaman hidupnya dan mengembangkan pengetahuannya. Dengan demikian para subjek pengkaji KM bukan hanya orang luar, melainkan orang-orang dalam juga. Oleh karena itu, pendekatan penelitiannya tidak hanya mengacu pada ilmu-ilmu alam, melainkan juga ilmu-ilmu sosial. Kebenaran ilmiah dari kajian KM dapat menunjukkan kebenaran ilmiah secara korespondensi dan pragmatis. Secara pragmatis kajian KM akan

memberikan kontribusi bagi upaya-upaya pengelolaan hutan lestari dan upaya-upaya peningkatan kualitas hidup manusia.

Ketiga, berdasarkan pandangan metodologis, penelitian dan pengembangan ilmu KM dapat dilakukan secara induktif dan deduktif. KM meliputi berbagai aspek yang saling terkait (ekologi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya). Pendekatan kajian KM dapat mengacu pada pendekatan masing-masing ilmu yang menyusun dan mendukungnya. Setiap ilmu penyusun dan atau pendukung dapat melakukan kajian monodisiplin. Namun demikian, kajian KM diutamakan menerapkan pendekatan multidisiplin.

Kempat, berdasarkan pandangan aksiologis, praktik-praktik KM menunjukkan adanya pengetahuan, nilai-nilai dan norma-norma yang dibangun oleh para pelaku praktik KM. Para peneliti luar akan banyak belajar dari praktik-praktik KM. Sebaliknya, kajian-kajian ilmiah KM oleh orang luar dapat menghasilkan ilmu pengetahuan yang dapat dipertukarkan dan dapat memperkaya pengetahuan masyarakat. Kajian-kajian ilmiah KM dapat pula menjadi dasar ilmiah bagi pengembangan suatu gerakan keberpihakan pada kelompok masyarakat lokal untuk membantu mereka dalam mewujudkan kualitas kehidupannya.

Dalam rangka mewujudkan perubahan paradigma pembangunan kehutanan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, mahasiswa yang belajar ilmu kehutanan membutuhkan kemampuan intelektual (daya kritis, pemahaman, dan analitis), emosional (kepekaan terhadap suatu gejala), dan tindakan dalam pergulatan dengan bidang-bidang yang amat sangat kompleks, sangat dinamis, multidimensi, dan sering memunculkan konflik. Oleh karena itu, studi kehutanan sosial

(*social forestry*) perlu terus dikembangkan untuk memberikan bekal kepada para mahasiswa tingkat sarjana, magister, dan doktor untuk mendukung pembangunan kehutanan berparadigma baru. Tujuan pengembangan ilmu kehutanan sosial adalah untuk menyiapkan tenaga ahli yang mampu mengamalkan ilmu pengetahuan KM untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat desa hutan khususnya dan masyarakat yang lebih luas melalui pengelolaan hutan yang lestari.

Epilog

Ilmu pengetahuan, tidak terkecuali kehutanan sosial, harus dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat bangsa. Pendidikan Tinggi tempat ilmu pengetahuan dikembangkan harus dapat membuat seseorang sensitif, berpikir kritis, berkemampuan dan berkemauan untuk memahami, menjelaskan dan memecahkan persoalan-persoalan teoretis maupun fenomena-fenomena praktis dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat dinamis dan kompleks menuntut pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu kehutanan sosial.

Degradasi hutan dan kemiskinan masyarakat desa hutan merupakan persoalan yang membutuhkan kontribusi ilmu pengetahuan untuk memecahkannya. Oleh karena itu, isu ini diangkat pada orasi ilmiah ini dalam kerangka devolusi pengelolaan hutan sebagai bentuk tanggung jawab intelektual. Tantangan pembangunan kehutanan dan peran ilmu kehutanan sosial semakin besar. Oleh karena itu penguatan ilmu kehutanan sosial melalui aktivitas penelitian dan pendidikan harus terus dilakukan.

Daftar Pustaka

- Ascher W. 1995. *Communities and Sustainable Forestry in Developing Countries*. Institute for Contemporary Studies Press. San Francisco, California.
- Awang SA. 2013a. Menggugat Ilmu Pengetahuan dan Ekonomi Politik Pembangunan Kehutanan di Indonesia. Dalam Kartodihardjo H. (Editor). *Kembali ke Jalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktik Kehutanan Indonesia*. Forci Development dan Tanah Air Beta, Yogyakarta.
- Awang SA. 2013b. Hutan untuk Kemakmuran Rakyat. Dalam Nugraha A., Santoso H., Ardiansyah I., Imron AM., Sanyoto R., Awang SA., Yuwono T., dan Istoto YEB. (eds). *Darurat Hutan Indonesia: Mewujudkan Arsitektur Baru Kehutanan Indonesia*. Wana Aksara, Banten.
- Bull G. and White A. 2002. *Global Forests in Transition: Challenges and Opportunities*. Proceedings of the International Conference Global Perspective on Indigenous Forestry: Linking Communities, Commerce and Conservation, Vancouver, Canada.
- Chambers R. 1993. *Challenging the Professions: Frontiers for Rural Development*. Intermediate Technology Publications, London.
- Darusman D. 2012. *Kehutanan Demi Keberlanjutan Indonesia*. IPB Press, Bogor.
- Departemen Kehutanan RI. 1986. *Sejarah Kehutanan Indonesia*. Jakarta.

- Dove MR. 1992. Foresters' Beliefs about Farmers: a Priority for Social Science Research in Social Forestry. *Agroforestry Systems* 17: 13–41.
- Dove MR. 1996. So Far from Power, So Near to the Forest: A Structural Analysis of Gain and Blame in Tropical Forest Development. Dalam Padoch C. and Peluso NL. (eds). *Borneo in Transition: People, Forests, Conservation, and Development*. Oxford University Press, Kuala Lumpur.
- Dove MR. 2011. *The Banana Tree at the Gate: A History of Marginal Peoples and Global Markets in Borneo*. Yale University Press.
- Dove MR., Sajise PE., and Doolittle AA. (eds). 2011. *Beyond the Complicating Conservation in Southeast Asia*. Duke University Press.
- Dunlap RE. and Michelson W. (eds). 2002. *Handbook of Environmental Sociology*. Greenwood Press, Westport, Connecticut, London.
- Edmunds D and Wollenberg E (Eds.). 2003. *Local Forest Management: The Impact of Devolution Policies*. Earthscan, London/Sterling, VA.
- FAO. 2011. *Reforming forest tenure: Issues, principles and process*. Rome.
- Field DR. and Burch Jr WR. 1988. *Rural Sociology and the Environment*. Social Ecology Press, Middleton, Wisconsin.
- Field DR., Luloff AE., and Krannich RS. 2005. *Rural Sociology and Natural Resources: Building on Firey*. In Lee RG. and Field DR. (eds). *Communities and Forests: Where People Meet the Land*. Oregon State University Press, Corvallis.

- Gibson CC., McKean MA., and Ostrom E. 2000. Explaining Deforestation: The Role of Local Institutions. Dalam Gibson CC., McKean MA., and Ostrom E. (eds). People and Forests: Communities, Institutions, and Governance. The MIT Press, Cambridge.
- Gillis M. 1988. Indonesia: Public Policies, Resource Management, and the Tropical Forest. Dalam Repetto R. and Gillis M. (eds). Public Policies and the Misuse of Forest Resources. Cambridge University Press, Cambridge.
- Gunarso P. 2013. Darurat Tutupan Hutan Indonesia ! Dalam Nugraha A., Santoso H., Ardiansyah I., Imron AM., Sanyoto R., Awang SA., Yuwono T., dan Istoto YEB. (eds). Darurat Hutan Indonesia: Mewujudkan Arsitektur Baru Kehutanan Indonesia. Wana Aksara, Banten.
- Herrera A. and da Passano MG. 2006. Land Tenure Alternative Conflict Management. FAO, Rome.
- Himawan H. 2013. Pemberian Akses Hutan Negara Kepada Masyarakat: Komitmen Setengah Hati ? Dalam Nugraha A., Santoso H., Ardiansyah I., Imron AM., Sanyoto R., Awang SA., Yuwono T., dan Istoto YEB. (eds). Darurat Hutan Indonesia: Mewujudkan Arsitektur Baru Kehutanan Indonesia. Wana Aksara, Banten.
- Kartodihardjo H. (Editor). 2013. Kembali ke Jalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktik Kehutanan Indonesia. Forci Development dan Tanah Air Beta, Yogyakarta.
- Korten DC. 1984. Rural Development Programming: the Learning Process Approach. Dalam Korten DC. and Klaus R. (eds). People Centered Development: Contributions toward Theory and Planning Frameworks. Kumarian Press, Connecticut.

- Korten DC. (ed). 1987. *Community Management: Asian Experience and Perspectives*. Kumarian Press, Connecticut.
- Kusel J. and Adler E. (eds). 2003. *Forest Communities, Community Forests*. Rowman & Littlefield Publishers Inc., Maryland.
- Lee RG., Field DR. and Burch WR. (eds). 1990. *Community and Forestry: Continuities in the Sociology of Natural Resources*. Westview Press, Boulder & London.
- Maser C. 1994. *Sustainable Forestry: Philosophy, Science, and Economics*. St. Lucie Press, Florida.
- Nanang M. and Inoue M. 2000. Local Forest Management in Indonesia: A Contradiction Between National Forest Policy and Reality. *International Review for Environmental Strategies* 1 (1): 175–191.
- Nugraha A., Santoso H., Ardiansyah I., Imron AM., Sanyoto R., Awang SA., Yuwono T., dan Istoto YEB. (eds). 2013. *Darurat Hutan Indonesia: Mewujudkan Arsitektur Baru Kehutanan Indonesia*. Wana Aksara, Banten.
- Poffenberger M. (ed). 1990. *Keepers of the Forest*. Ateneo de Manila University Press, Manila.
- Potter L. 1996. Forest Degradation, Deforestation, and Reforestation in Kalimantan: Towards a Sustainable Land Use ? Dalam Padoch C. and Peluso NL. (eds). *Borneo in Transition: People, Forests, Conservation, and Development*. Oxford University Press, Kuala Lumpur.
- Pulhin JM. and Inoue M. 2008. Dynamics of Devolution Process in the Management of the Philippine Forests. *International Journal of Social Forestry* 1(1):1–26.

- Pulhin JM., Inoue M. and Enters T. 2007. Three Decades of Community-Based Forest Management in the Philippines: Emerging Lessons for Sustainable and Equitable Forest Management. *International Forestry Review* Vol. 9 (4).
- Pulhin JM. and Dressler WH. 2009. People, Power and Timber: The Politics of Community-Based Forest Management. *Journal of Environmental Management* **Vol. 91 (1): 206–214**.
- Purnama B.M. (Tanpa Tahun). Pengelolaan hutan lestari sebagai dasar peningkatan peran sektor kehutanan. Badan Planologi Kehutanan.
- Romm J. 1993. Sustainable Forestry, an Adaptive Social Process. Dalam Aplet GH., Johnson N., Olson JT., and Sample VA. (eds). *Defining Sustainable Forestry*. Island Press, Washington DC.
- Rositah E. 2005. Kemiskinan Masyarakat Desa Sekitar Hutan dan Penanggulangannya: Studi Kasus di Kabupaten Malinau. *Governance Brief*. CIFOR.
- Rowlands M. 2000. *The Environmental Crisis, Understanding the Value of Nature*. St. Martin's Press Inc., New York.
- Santoso H. 2013. Sulitnya Kalangan Miskin Memanfaatkan Hutan: Sebuah Potret Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa. Dalam Nugraha A., Santoso H., Ardiansyah I., Imron AM., Sanyoto R., Awang SA., Yuwono T., dan Istoto YEB. (eds). *Darurat Hutan Indonesia: Mewujudkan Arsitektur Baru Kehutanan Indonesia*. Wana Aksara, Banten.
- Suharjito D. dan Putro HR. (editor). 2013. *Pembangunan Kehutanan Indonesia Baru: Refleksi dan Inovasi Pemikiran*. IPB Press, Bogor.

- Suharjito D. 2013. Reforma Agraria di Sektor Kehutanan: Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari, Keadilan Sosial dan Kemakmuran Bangsa. Dalam Kartodihardjo H. (editor). Kembali ke Jalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktik Kehutanan Indonesia. Forci Development dan Tanah Air Beta, Yogyakarta.
- Suharjito D. 2012. Integrating Community Forestry and Forest Products Based-Rural Industrialization for Enhancing Rural Community Welfare and Sustaining Forest Resources. In Proceeding International Conference on Strengthening Forest Science and Technology for Better Forestry Development. Forestry Research and Development Agency, Ministry of Forestry.
- Suharjito D. 2009. Devolusi Pengelolaan Hutan di Indonesia: Perbandingan Indonesia dan Philipina. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 15 (3): 123–130.
- Suharjito D; Khan A.; Djatmiko WA.; Sirait MT., Evelyn S. 2000. Karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Aditya Media Press, Yogyakarta.
- Suhendang E. 2013. Perkembangan Paradigma Kehutanan. Suharjito D. dan Putro HR. (Editor). 2013. Pembangunan Kehutanan Indonesia Baru: Refleksi dan Inovasi Pemikiran. IPB Press, Bogor.
- Sunderlin W.D., Dewi S. and Puntodewo A. 2007. Poverty and Forests: Multi-country analysis of spatial association and proposed policy solutions. CIFOR Occasional Paper No. 47. Bogor.

- Tacconi L. and Kurniawan I. 2006. Forests, Agriculture, Poverty and Land Reform: the Case of The Indonesian Outer Islands. Occasional Papers. Crawford School of Economics and Government, the Australian National University.
- Tran NT. and Sikor T. 2006. From Legal Acts to Actual Powers: Devolution and Property Rights in the Central Highlands of Vietnam. *Forest Policy and Economics* 8: 397– 408.
- Van Gelder B. and O’Keefe P. 1995. *The New Forester*. Intermediate Technology Publications, London.
- Van Gelder JL. 2010. What Tenure Security? The Case for a Tripartite View. *Land Use Policy* 27: 449–456.
- Vayda AP. and Sahur A. 1996. Bugis Settlers in East Kalimantan’s Kutai National Park. Center for International Forestry Research, Bogor.
- Vayda AP. 2009. *Explaining Human Actions and Environmental Changes*. AltaMira Press, Lanham.
- Widyantoro B. 2013. Optimalisasi Penggunaan Lahan dan Pemanfaatan Hasil Hutan: Ketahanan Pangan dan Energi Biomas. Bahan Presentasi dalam Workshop Peningkatan Kinerja Hutan Tanaman melalui Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Jakarta 17 Desember 2013.

Ucapan Terima Kasih

Hadirin yang saya muliakan

Saya sangat bersyukur atas anugerah dari Allah Swt. untuk mengemban jabatan Guru Besar, suatu jabatan akademik tertinggi. Jabatan Guru Besar ini dapat saya capai atas do'a, bimbingan, kerja sama dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang amat sangat kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Pendidikan Tinggi, Pimpinan dan Anggota Senat Akademik IPB, Rektor IPB Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc., Ketua Dewan Guru Besar IPB Prof. Dr. Ir. Rudy Purwanto dan Sekretaris Dewan Guru Besar IPB Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, Wakil Rektor Bidang Pengembangan Sumber daya Manusia Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, MEc dan para Wakil Rektor lainnya, Dekan Fakultas Kehutanan IPB Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., Ketua Departemen Manajemen Hutan Dr. Ir. Ahmad Budiaman, Ketua Senat Fakultas Kehutanan Prof. Dr. Ir. Yusuf Sudo Hadi, M.Agr., dan seluruh anggota Senat Fakultas yang telah memproses dan menyetujui usulan kenaikan jabatan akademik saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi Guru Besar Tetap pada Fakultas Kehutanan IPB pada bidang ilmu Manajemen Hutan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Tim Penilai Karya Ilmiah dan Tim Penilai Angka Kredit IPB dan Ditjen Dikti. Kepada segenap pejabat dan tenaga kependidikan yang telah melancarkan proses berkas usulan saya, saya menyampaikan terima kasih.

Kepada guru-guru dan teman-teman sejawat di Bagian Kebijakan Kehutanan Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan

IPB tempat saya tumbuh dan berkembang, saya menyampaikan terima kasih. Teman-teman secara bersama-sama merajut kebersamaan, tolong-menolong, saling menguatkan. Prof. Dr. Ir. Dudung Darusman, MA sebagai Kepala Bagian ataupun selaku pribadi memberikan keteladanan yang menggugah spirit saya untuk terus meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan pengamalannya; demikian pula Ir. Sudaryanto, Prof. Dr. Ir. Hardjanto, Ir. M. Chamim Mashar, MM; Dr. Ir. Bahruni, Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, Dr. Ir. Iin Ichwandi, Dr. Ir. Yulius Hero, Dr. Dodik Ridho Nurrochmat, Prof. Dr. Ir. Bramasto Nugroho, Dr. Ir. Leti Sundawati, Handian Purwawangsa S.Hut MSi, Dr. Ir. Sudarsono Soedomo, Dr. Soni Trison menjadi teman diskusi, melaksanakan tugas-tugas akademik, maupun non-akademik.

Kepada paraguru dan teman sejawat: Prof. Dr. Ir. Endang Suhendang, Ir. Ahmad Hadjib, MS; Dr. Ir. M. Buce Saleh, Dr. Ir. Hendrayanto, Ir. Budi Prihanto, MS; Prof. Dr. Ir. Elias, Dr. Ir. Gunawan Santosa, Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, Prof. Dr. Ir. Iskandar Zulkarnaen, Prof. Dr. Ir. Muh. Yusram Massijaya, Ir. Haryanto, MS; Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, Dr. Ir. Burhanuddin Masy'ud, dan lainnya di lingkungan Departemen Manajemen Hutan, Departemen Hasil Hutan, Departemen KSHE, dan Departemen Silvikultur yang tidak dapat disebutkan semuanya, saya menyampaikan terima kasih atas segala bentuk dukungan dan kerja samanya. Kepada para mahasiswa program Sarjana (S-1), Magister (S-2), dan Doktor (S-3) saya menyampaikan terima kasih, pertanyaan-pertanyaan kritisnya memotivasi saya untuk terus meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan yang saya geluti.

Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada senior dan teman-teman sejawat dari universitas lain: Prof. Dr. Ir. Hasanu Simon

(alm), Prof. Dr. Ir. San Afri Awang (UGM), Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono (UNMUL), Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam (UNHAS), Dr. Golar S.Hut (UNTAD), Dr. Nur Arafah (UNHALU), Dr. Ir. Christine Wulandari (UNILA), Prof. Dr. Ir. Udiansyah (UNLAM), Budi Setiawan S.Hut, MSi (UNRAM); dari forum multipihak: Ir. Sih Yuniati, MM., Ir. Muayat Ali Muhshi, Ir. Andri Santosa (FKKM), Lembaga Swadaya Masyarakat: Ir. Arif Aliadi, MSi (LATIN); Ir. Hery Santoso, MS (JAVLEC); Ir. Rahmat Hidayat (WARSI); dari Lembaga Penelitian: Dr. Ir. Moira Mulyono, Ahmad Dermawan MSc (CIFOR); dari kalangan bisnis: Ir. Nana Suparna; dari pemerintah: Dr. Ir. Hariadi Himawan; Ir. Wiratno, MSc; Ir. Erna Rosdiana, MSi; dan teman-teman lain yang selama ini memberikan perhatian dan bekerja sama melakukan perjuangan yang sama di bidang Kehutanan Sosial melalui Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) maupun berbagai kesempatan lainnya. Kepada teman-teman sejawat di Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan *Indonesian Forestry Certification Cooperation* (IFCC) saya menyampaikan terima kasih: Dr. Ir. Dradjad Wibowo, Ir. Daru Asycarya, MM; Ir. Nurcahyo Adi, Ir. Dian Novarina, Dr. Ir. Aulia Aruan, Ir. Sera dan lainnya telah bersama-sama membangun jalan untuk mendukung upaya mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Terima kasih saya sampaikan juga kepada teman-teman sejawat dari berbagai lembaga: Kementerian Kehutanan, Perhutani, Inhutani, swasta kehutanan, Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga donor yang bekerja sama dalam berbagai kegiatan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu, yang secara langsung ataupun tidak langsung telah menunjang karir akademik saya. Kepada para petani pengelola hutan yang menjadi sumber pengetahuan dimana saya banyak belajar dan memberikan inspirasi kepada saya, saya menyampaikan terima kasih.

Saya banyak belajar kepada teman-teman sejawat tersebut dalam banyak kesempatan kerja sama, berbagi dan memperkaya pengetahuan, mengasah intelektual, saling memahami perbedaan sudut pandang, mengasah kepekaan terhadap warna-warni kehidupan. Pencapaian Guru Besar ini bukan akhir dari proses belajar, melainkan menguatkan rasa tanggung jawab dan menjadi motivasi untuk terus berkarya untuk bersama-sama mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari bagi kemakmuran kita semua sebagai bangsa.

Secara khusus saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada guru-guru saya yang amat sangat saya hormati Dr. Ir. Junus Kartasubrata, Prof. Dr. Ir. Sajogjo (alm), Prof. Dr. Ir. Pudjiwati Sajogjo (alm), Prof. Dr. SMP. Tjondronegoro yang telah membuka pintu dan membimbing saya memasuki dunia penelitian untuk meniti karir akademik di bidang ilmu kehutanan sosial. Beliau-beliau memberikan inspirasi kepada saya untuk peka dan memberi perhatian besar kepada masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan bangsa. Saya merasa sangat beruntung memperoleh kesempatan untuk memperoleh ilmu secara langsung dari Prof. Sajogjo (alm) dan Prof. Tjondro ilmuwan besar bangsa Indonesia yang diakui bukan saja secara nasional tetapi juga internasional. Demikian pula terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada yang amat sangat saya hormati Prof. Dr. S. Boedhisantoso, Dr. Iwan Tjitradjaja dan Prof. Dr. Ir. Dudung Darusman, MA sebagai pembimbing selama saya menempuh pendidikan S-3 di UI, beliau-beliau telah menguatkan landasan keilmuan bagi karir akademik saya. Jasa beliau-beliau amat sangat besar bagi kehidupan saya.

Terima kasih saya sampaikan kepada yang sangat saya hormati guru-guru saya di SD Negeri Dukuh Damu, SMP Negeri Slawi, dan SMA Negeri I Slawi di Kabupaten Tegal yang telah mendidik, mencerdaskan, dan mendo'akan semua murid-muridnya untuk kemajuan kehidupan bangsa. Jasa-jasa beliau sangat luar biasa, semoga Allah Swt. membalasnya dengan pahala yang besar dan terus menerus mengalir.

Menjadi Guru Besar saya dedikasikan kepada kedua orang tua saya yang amat sangat saya hormati dan saya cintai, Bapak (Mastap Brotosoehardjo) dan ibu (Tasryah) yang telah mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta senantiasa memanjatkan do'a siang dan malam tanpa lelah untuk kebahagiaan anak-anaknya, mudah-mudahan jabatan akademik Profesor yang saya capai ini sebagai salah satu wujud *mikul duwur mendhem jero*. Kepada kakak-kakak dan adik-adik kandung saya: mas Dib (Ir. Agus Aman Sudiby, MM) sekeluarga, mas Woyo (Drs. Edy Siswoyo) sekeluarga, mas Anto (Drs. Budi Sukamto, MM) sekeluarga, Yanti (Dra. Suspriyanti, MM) sekeluarga, Hardi (Ir. Sushardi, MS) sekeluarga, Iroh (Dra. Sutin Akhiroh) sekeluarga, Yatun (Dra. Susrimasyatun) sekeluarga, yu Nok (Suswiyarti alm.) dan yu Eti (Suskhaesti alm.), saya sekeluarga menghaturkan terima kasih dan rasa hormat atas segala bimbingan, do'a, dan kehangatan keluarga. Demikian juga kepada mertua Bapak (Soedjani alm.) dan ibu (Ummamah); kakak-kakak dan adik-adik ipar saya: mas Toto sekeluarga, Yanto sekeluarga, Isnen sekeluarga, Udin sekeluarga, Ari sekeluarga, dan Wildan sekeluarga, kami menyampaikan terima kasih.

Selama menjalani tugas-tugas sehari-hari, saya telah mengurangi apa yang menjadi hak istri dan anak-anak saya. Kepada istri saya Endang Sri Wahyuni, SPd. dan anak-anak saya Ahmad Aulia

Arsyad, SKPm., Annisa Mustabsiratul Ummah, SKPm., dan Aufa Abrar Abyan, terima kasih atas cinta dan kasih sayang, pengertian, do'a, dan dukungan lainnya.

Sebelum mengakhiri Orasi Ilmiah ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Panitia Penyelenggara Orasi Ilmiah Guru Besar IPB ini yang diketuai oleh saudara Dr. Ir. Drajat Martianto, MSc.

Kepada Bapak/Ibu/saudara hadirin semuanya, saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan rasa hormat atas perkenan Bapak/Ibu/saudara menghadiri acara Orasi Ilmiah Guru Besar ini, semoga Allah Swt. membalas amal baik Bapak/Ibu/saudara hadirin sekalian dengan balasan yang berlipat ganda. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahan.

Akhirnya kami sekeluarga mengucapkan syukur Alhamdulillah atas Rahmat dan Karuni Allah Swt., dan hanya kepada Mu ya Allah kami mohon perlindungan dan pertolongan.

Billahittaufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



Foto Keluarga



Depan: Prof. Dr. Ir. Didik Suharjito, MS dan Endang Sri Wachjuni, SPd (istri); Belakang dari kanan: Ahmad Aulia Arsyad, SKPm (anak pertama), Annisa Mustabsiratul Ummah, SKPm (anak kedua), dan Aufa Abrar Abyan (anak ketiga)



Riwayat Hidup

Identitas Diri

1. Nama : Prof. Dr. Ir. Didik Suharjito, MS
2. Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 1 April 1963
3. Jabatan : Guru Besar
4. Pangkat & Golongan : Pembina Utama Muda/IV-C
5. Alamat Rumah : Griya Katulampa B-III No. 22 Bogor Timur
HP : 08128012991
E-mail : dsuharjito@gmail.com
6. Alamat Kantor : Departemen Manajemen Hutan,
Fakultas Kehutanan IPB, Kampus
IPB Darmaga-Bogor

Riwayat Pendidikan

1. Ir (S-1), Jurusan Manajemen Hutan IPB (1986);
2. Magister Sains (S-2), Program Studi Sosiologi Pedesaan, Pascasarjana IPB (1992);
3. Dr (S-3), Program Studi Antropologi, Pascasarjana Universitas Indonesia (2002)

Keanggotaan dalam Organisasi

1. The Forest History Society;
2. The Commonwealth Forestry Association;
3. Asosiasi Antropologi Indonesia;
4. Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat

Riwayat Pekerjaan

1994–sekarang	Staf Pengajar pada Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB
2005–2013	Ketua Departemen Manajemen Hutan IPB
1989–1994	Asisten Koordinator Proyek Penelitian <i>Java Social Forestry Program</i> pada Pusat Studi Pembangunan, Lembaga Penelitian IPB
1988–1989	Departemen Kehutanan RI
1987–1988	Magang Asisten Peneliti pada Pusat Studi Pembangunan, Lembaga Penelitian IPB

Kegiatan Pendidikan

1. Program Pendidikan Sarjana (S1)

No.	Tahun	Mata Kuliah
1.	1994–sekarang	Kehutanan Masyarakat
2.	1994–2005	Sosiologi Kehutanan
3.	1994–2001	Penyuluhan Kehutanan
4.	2005–sekarang	Metode Penulisan Ilmiah
5.	2005–sekarang	Pengelolaan Hutan Rakyat

2. Program Pendidikan Pascasarjana (S2/S3)

No.	Tahun	Mata Kuliah
1.	2000–sekarang	Kehutanan Masyarakat Lanjutan
2.	2000–2007	Sosiologi Kehutanan Lanjutan
3.	2007–sekarang	Etnoforestri
4.	2007–sekarang	Metodologi Penelitian
5.	2007–sekarang	Etika Kehutanan dan Lingkungan
6.	2007–sekarang	Kebijakan Pembangunan Kehutanan
7.	2007–sekarang	Pengelolaan Ekosistem Hutan Kolaboratif

3. Ketua dan Anggota Pembimbing Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Kegiatan Penelitian (lima tahun terakhir)

2011–2014	Researcher (as Forestry Sociologist) on the research project of Ecological and socioeconomic functions of tropical lowland rainforest transformation systems in Sumatra, Indonesia. International Research Collaboration IPB, Universitas Jambi, LIPI, Gottingen University;
2013	The study on social safeguard of redd+ implemented in Indonesia. Project of Capacity Development for Climate Change Strategies In Indonesia, Japan International Cooperation Agency Indonesia.
2012	Researcher (as Forestry Sociologist) on Evaluation of FPIC implementation in UN-REDD+ project in Central Sulawesi. United Nation REDD+ Programme Indonesia.
2012	Researcher (as Forestry Sociologist) on Evaluation of the Harapan Rainforest Project 2011–2013 (Phase I) in Sumatera. Danish International Development Assistance.
2012	Researcher (as Forestry Sociologist) Study on Good Practices of Social Forestry for Sustainable Forest Management and REDD+; Japan International Cooperation Agency Indonesia.
2008–2011	Researcher (as Forestry Sociologist) on the Research Project of Strengthening Rural Institutions to Support Livelihood Security for Smallholders Involved in Industrial Tree-planting Programs in Vietnam and Indonesia. International Research Collaboration CIFOR-IPB-BMZ Germany;

4. Berpartisipasi dalam Pelatihan (antara lain):

No.	Topik	Organisasi/ Tempat	Tahun
1.	Community-Based Natural Resource Management	Asian Institute of Management, The Philippines	5–9/2/2001
2.	International Training on Gender, Organizational Change, Agriculture and Leadership	International Agricultural centre (IAC), Wageningen-The Netherlands	16/1sd5/2/2000
3.	Training of Trainers Course on Agroforestry for Improved Land use & Livelihood Systems in Southeast Asia,	Chiang Mai University -Thailand	8–20/3/1999
4.	Training-Workshop on Rapid Rural Appraisal	University of The Philippines at Los Banos (UPLB)	22/5 sd 3/6 1991

5. Berpartisipasi dalam *International Study Tour and Workshop* (tiga tahun terakhir), antara lain:

No.	Topik	Tempat	Tahun
1.	PEFC (Program for Endorsement of Forest Certification) Forest Certification Week (Stakeholder Dialogue & PEFC General Assembly)	Kuala Lumpur Malaysia	2013
2.	PEFC General Assembly	Vienna Ustria	2011
3.	The dissemination workshop for the project “Strengthening Rural Institutions to Support Livelihood Security for Smallholders Involved in Industrial Tree-planting Programs in Vietnam and Indonesia”	Gottingen, Germany	2010

Lain-lain

1. Koordinator Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (2002–2006)
2. Ketua Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia (2011–sekarang)
3. Ketua Komite Standarisasi IFCC, *the Indonesian Forest Certification Cooperation* (2012–sekarang)
4. Anggota Dewan Redaksi Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan, Pusat Penelitian Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan-Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kementerian Kehutanan RI;

5. *Visiting Professor at University of Joensuu, Finland* (September–October 2005)

Karya Ilmiah yang dipublikasikan (tiga tahun terakhir), antara lain:

- (1) **Suharjito D.** 2014. Pengantar Metodologi Penelitian. Bogor: IPB Press.
- (2) **Suharjito D.** 2013. Peran Ilmu Pengetahuan dalam Pembangunan Kehutanan di Indonesia *dalam* **Suharjito D.**, Putro HR. (Editor). Pembangunan Kehutanan Indonesia Baru: Refleksi dan Inovasi Pemikiran. Bogor: IPB Press.
- (3) Kartodihardjo H, Nugroho B, **Suharjito D**, Dermawan A. 2013. Development of Small Holder Plantation Forests: An Analysis from Policy Process Perspective. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 19 (2): 111-118.
- (4) Innah HS, **Suharjito D**, Dharmawan AH, Darusman D. 2013. Collective Action Typologies and Reforestation in Indigenous Community of Biak-Papua. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 19 (1): 11–22.
- (5) **Suharjito D.** 2013. Reforma Agraria di Sektor Kehutanan: Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari, Keadilan Sosial dan Kemakmuran Bangsa. Dalam Kartodihardjo H. (editor). Kembali ke Jalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktik Kehutanan Indonesia. Hal. 423–449. Yogyakarta: Forci Development dan Tanah Air Beta.

- (6) **Suharjito D.** 2012. Community-Centered Forest Rehabilitation in Indonesia: Past Experiences and Future Direction. In Proceedings of International Conference on New Perspectives of Tropical Forest Rehabilitation for Better Forest Functions and Management. Hal: 42–46. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- (7) **Suharjito D.** 2012. Integrating Community Forestry and Forest Products Based-Rural Industrialization for Enhancing Rural Community Welfare and Sustaining Forest Resources. In Proceeding International Conference on Strengthening Forest Science and Technology for Better Forestry Development. Hal: 597–603. Forestry Research and Development Agency, Ministry of Forestry.
- (8) Siregar UJ, Siregar IZ, Budi SW, Hero Y, **Suharjito D**, Hardjanto. 2012. Incorporating Social and Natural Science in the Restoration of an Indonesian Conservation Forest: A Case Study from Jambi. In Stanturf J, Madsen P., Lamb D. (eds). A Goal-Oriented Approach to Forest Landscape Restoration. Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer.
- (9) Nurrochmat DR, Hasan MF, **Suharjito D**, Budiaman A, Hardianto A, Ekayani M, Sudarmalik, Purwawangsa H, Mustaghfirin, Ryandi ED. 2012. Ekonomi Politik Kehutanan: Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan. Jakarta: INDEF.
- (10) Roslinda E, Darusman D, **Suharjito D**, Nurrochmat DR. 2012. Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 18 (2): 78–85.

- (11) **Suharjo D.** 2011. Tradisi dan Perubahan Budidaya Pohon di Desa Rambahan Kuansing dan Desa Ranggung Tanah Laut. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 17 (3): 95–102.
- (12) **Suharjo D.** 2011. Membangun Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Hutan Konservasi di Indonesia. Dalam Prosiding Seminar Nasional Konservasi Tumbuhan Tropika: Kondisi Terkini dan Tantangan ke Depan. LIPI.
- (13) Ohorella S, **Suharjo D**, Ichwandi I. 2011. Efektivitas Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Sumber daya Hutan pada Masyarakat Rumahkay di Seram Bagian Barat, Maluku. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 17 (2): 49–55.
- (14) Arafah N, Darusman D, **Suharjo D**, Sundawati L. 2011. Kaindea: Dinamika Pengelolaan Hutan Adat di Pulau Kecil: Studi Kasus Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. *Jurnal Ilmu Kehutanan* 5 (1): 30–39.
- (15) **Suharjo D.** 2010. Menerapkan Teknologi Agroforestry di dalam Kawasan TAHURA Senami Jambi yang Terdegradasi: Suatu Tinjauan Sosiologis. Dalam Prosiding Seminar Nasional Agroforestry Tradisional di Indonesia. Universitas Lampung and INAFE.
- (16) Prabowo SA, Basuni S, **Suharjo D.** 2010. Konflik Tanpa Henti: Peremukiman dalam Kawasan Taman Nasional Halimun Salak. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 16 (3): 137–142.